

## BAB I

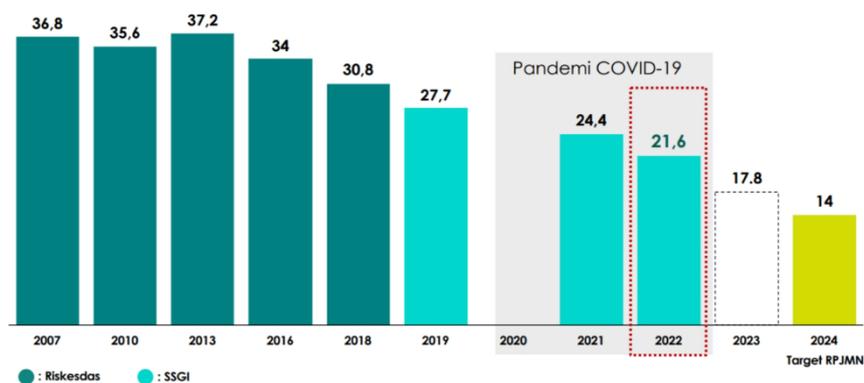
### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan *stunting* masih menjadi sebuah isu dan permasalahan nasional yang masih belum dapat terselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa masalah *stunting* masih belum dapat terselesaikan dengan tepat, salah satunya ialah kurangnya sebuah edukasi kepada para ibu mengenai pentingnya pemberian dan pencukupan terpenuhinya gizi anak. *Stunting* merupakan sebuah kondisi dimana pertumbuhan anak mengalami perlambatan tidak seperti pada seusianya, hal ini bisa kita ketahui dari perlambatan tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan dengan anak lain seusianya (Latifa, 2018). Terjadinya *stunting* dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada usia janin/bayi pada 1000 masa hari pertama kehidupan. Pemenuhan segala nutrisi pada masa usia janin/bayi, bisa terpenuhi dengan baik jika nutrisi pada ibu hamil dapat tercukupi dengan tepat serta memerhatikan beberapa kebutuhan nutrisi baik itu dari sumber vitamin maupun asupan makanan serta minuman yang mengandung asam folat dan zat besi merupakan sebuah kombinasi yang baik dan penting bagi pertumbuhan janin pada ibu hamil (Ningrum et al., 2020).

Kondisi *stunting* yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan yang serius. Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah gizi yang kompleks. Kondisi kekurangan gizi kronis seperti *stunting* berpotensi diperparah dengan kekurangan gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral pada kelompok berisiko. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* di Indonesia pada setiap tahunnya selalu menunjukkan angka yang cenderung mengalami penurunan dalam persebarannya (Annur, 2023). Dimana pada tahun 2021 mencapai 24,4% dan terus mengalami penurunan. Seperti hasil yang ditunjukkan dalam gambar grafik penurunan *stunting* berikut.

Gambar 1 Prevalansi *Stunting* di Indonesia

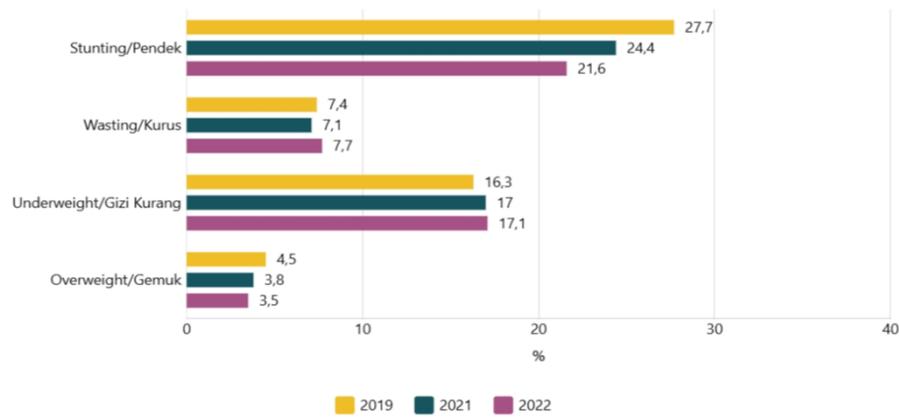


Sumber: (Kemkes RI, 2022)

Berdasarkan pada gambar 1 menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2023 relatif menunjukkan penurunan terhadap kasus *stunting* di Indonesia. Meski begitu, permasalahan *stunting* pada anak tetap tidak bisa dibiarkan karena akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Hal ini bisa dilihat dalam jangka pendek dan jangka panjang mengenai apa yang nantinya akan terjadi pada anak jika terkena *stunting*, salah satunya akan mengalami penurunan kemampuan kognitif, verbal, motorik, peningkatan morbiditas bahkan mortalitas yang disebabkan oleh infeksi, dan pertumbuhan serta perkembangan tubuh anak yang cenderung memburuk (Atmojo et al., 2020). Maka dari itu, diperlukan beberapa strategi yang diperlukan untuk dapat menekan dan menanggulangi angka *stunting* agar tidak terus mengalami kenaikan, salah satu langkah yang telah Pemerintah Indonesia lakukan ialah dengan melakukan penurunan faktor risiko dengan intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menangani penyebab *stunting* berupa adanya asupan nutrisi dan adanya infeksi serta intervensi gizi sensitif yang bertujuan untuk mengatasi penyebab tidak langsung seperti ketahanan pangan, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, serta pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua. Meski prevalansi *stunting* berdasarkan pada gambar 1 tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan pada setiap tahunnya, namun *stunting* menjadi

permasalahan gizi yang paling tinggi untuk balita di Indonesia. Berikut pemaparan data pada gambar berikut.

Gambar 2 Survei Status Gizi Indonesia



Sumber: (Databoks Katadata, 2023)

Intervensi gizi menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah. Sebab kualitas peningkatan gizi pada usia janin/bayi akan sangat berhubungan dengan kuantitas dari kualitas gizi yang diperoleh oleh usia janin/bayi. Dalam sebuah gerakan 1000 HPK sudah dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan kekurangan gizi, dibutuhkan peran dari intervensi gizi, baik itu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang keduanya memiliki peran penting dalam menanggulangi permasalahan perbaikan gizi (Rosha et al., 2016). Pada intervensi gizi spesifik mencakup peran dari sektor kesehatan seperti adanya penyediaan stok makanan tambahan, penyediaan vitamin, pengecekan status gizi ibu, dan pencegahan infeksi. Lalu pada intervensi gizi sensitif dilakukan oleh sektor non-kesehatan yang mencakup beberapa hal seperti sarana penyediaan air bersih, adanya sebuah ketahanan pangan yang kuat, pengentas dari permasalahan kemiskinan, dan adanya jaminan kesehatan yang memadai. Penerapan intervensi gizi ini menjadi sebuah terobosan inovasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani masalah stunting, meskipun dalam beberapa daerah sudah menerapkan kebijakan tersebut dengan beberapa aspek yang berbeda. Pemerintah

Indonesia telah membuat rangkaian kebijakan, peraturan, dan program sebagai bentuk wujud nyata dari rasa kepedulian dan tindakan tegas dalam menangani permasalahan *stunting* di Indonesia agar dapat mengalami penurunan yang signifikan. Maka pemerintah mewujudkannya dalam sebuah bentuk Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Dimana dalam peraturan tersebut memuat sebuah isi yang menyerukan agar pemerintah bersama dengan masyarakat dapat kebersamaan dan ikut berpartisipasi dalam perbaikan percepatan gizi masyarakat prioritas pada 1000 HPK (Maulana et al., 2022). Tindak lanjut dari peraturan tersebut ialah dengan melakukan pembentukan program pencegahan *stunting* di 100 kabupaten/kota di Indonesia. Dalam pembentukan program tersebut, intervensi gizi menjadi dasar kerangka yang melatar belakangi dibentuknya program pencegahan *stunting* di 100 kabupaten/kota di Indonesia dengan kelompok sasaran target meliputi para calon ibu, ibu hamil, anak bayi, dan balita. Program tersebut dijalankan dan direalisasikan sudah di beberapa daerah.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang dijadikan target oleh pemerintah sebagai intervensi dalam penanganan permasalahan mengenai *stunting*. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa wilayah Kabupaten Bantul dapat terkena *stunting* karena salah satunya disebabkan oleh adanya faktor dari status gizi ibu pada saat hamil, dimana pada saat masa kehamilannya nutrisi dan zat gizi asupan makanan, minuman, dan vitamin belum memenuhi dengan baik (Komalasari et al., 2020). Dengan adanya cakupan data seperti itu, hal ini bisa menjadi acuan bersama dengan memfokuskan titik utama permasalahan gizi pada ibu hamil memerlukan sebuah pemantauan dan evaluasi yang baik untuk keberlangsungan dalam menangani permasalahan *stunting*, tepatnya untuk daerah Kabupaten Bantul agar permasalahan *stunting* dapat segera mendapatkan sebuah penanganan yang sesuai untuk bisa ditekan laju penyebaran *stunting* tersebut (Hidayat, 2023). Selain itu, terdapat sebuah data yang diperoleh

dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Berikut jumlah *stunting* per kapanewon di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sampai dengan 2022, sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah *Stunting* per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

No.	Kapanewon di Kabupaten Bantul	Jumlah Stunting Tahun 2022	Jumlah Stunting Tahun 2023
1.	Kapanewon Bambanglipuro	95	71
2.	Kapanewon Banguntapan	138	142
3.	Kapanewon Bantul	181	144
4.	Kapanewon Dlingo	258	144
5.	Kapanewon Imogiri	492	434
6.	Kapanewon Jetis	204	204
7.	Kapanewon Kasihan	133	151
8.	Kapanewon Kretek	90	88
9.	Kapanewon Pajangan	202	176
10.	Kapanewon Pandak	191	176
11.	Kapanewon Piyungan	228	177
12.	Kapanewon Pleret	131	178
13.	Kapanewon Pundong	67	127
14.	Kapanewon Sanden	71	56
15.	Kapanewon Sedayu	205	139
16.	Kapanewon Sewon	177	95
17.	Kapanewon Srandakan	225	129

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Dari data tersebut dapat dilihat bersama bahwa persebaran *stunting* di Kabupaten Bantul cenderung menunjukkan hasil yang beragam. Ada yang menunjukkan persentase turun pada setiap tahunnya, seperti di Kapanewon Bambanglipuro, Banguntapan, Dlingo, Imogiri,

Pandak, Pajangan dan Piyungan. Lalu terdapat hasil yang menunjukkan persentase yang belum konsisten (naik turun) seperti di Kapanewon Bantul, Jetis, Kasihan, Kretek, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, dan Srandakan. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa *stunting* yang berada di Kabupaten Bantul pada setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Kepala BKKBN menyampaikan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Bantul yang cukup tinggi dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan mencapai 4% (Hasanudin, 2023). Kabupaten Bantul juga dinilai memiliki kometimen tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni dengan adanya dana yang dikeluarkan merupakan salah satu kucuran dana untuk penurunan *stunting* di tingkat kapanewon hingga padukuhan (Hidayat, 2023).

Dari pembahasan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk memilih Kabupaten Bantul sebagai lokasi penelitian dalam meneliti inovasi beserta menggambarkan seperti apa kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama para aktor yang terlibat sehingga mampu memberikan hasil yang signifikan dalam penurunan persebaran *stunting* pada kawasan Kabupaten Bantul agar terus mengalami penurunan yang signifikan untuk setiap tahunnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan sebelumnya dalam latar belakang masalah, penelitian yang selanjutnya akan dilakukan dan dikaji oleh peneliti dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa faktor penyebab *stunting* di Kabupaten Bantul berdasarkan indikator sistem aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (e-PPGBM)?
2. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam program inovasi penanganan *stunting* yang sudah berjalan di Kabupaten Bantul?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum dalam penelitian ini memiliki tujuan umum untuk bisa mengetahui bentuk-bentuk inovasi dan proses kolaborasi apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani permasalahan *stunting*. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat beberapa tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam program inovasi penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui penyebab faktor terjadinya *stunting* yang ada di kawasan Kabupaten Bantul.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan *stunting*, baik itu diranah kabupaten hingga nasional. Berbagai pihak terkait seperti pihak puskesmas, dinas kesehatan, dan berbagai pihak yang memiliki wewenang dalam menangani *stunting*. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi terbaru seputar inovasi kebijakan dari daerah yang nantinya dapat sebagai acuan untuk menangani *stunting* secara nasional.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, seperti para pembaca yang tertarik dengan penelitian *stunting* ini dan juga untuk para peneliti selanjutnya yang memiliki rasa ketertarikan untuk melakukan penelitian serupa atau hendak ingin mengkaji penelitian ini lebih dalam sebagai acuan untuk melakukan penelitian dengan tema dan sub bab mengenai permasalahan *stunting*, baik itu ditingkat daerah maupun nasional.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Permasalahan *stunting* menjadi sebuah permasalahan yang berskala nasional. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa permasalahan *stunting* memerlukan cara ataupun langkah yang tepat agar *stunting* dapat ditangani dengan tepat, salah satunya dengan berjalannya *collaborative governance* untuk menyelesaikan permasalahan *stunting*. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dalam menangani *stunting*:

No	Judul	Nama Penulis dan Link Artikel Jurnal	Hasil Pembahasan
1.	Collaborative governance dalam penanganan stunting	(Ipan et al., 2021) <a href="#">Collaborative governance dalam penanganan stunting   Ipan   Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen (unmul.ac.id)</a>	Penanganan <i>stunting</i> tidak hanya dapat diatasi oleh salah satu pihak saja, namun memerlukan peran dan kolaborasi bersama beberapa pihak. Penelitian ini dilakukan di UPTD puskesmas Ciampel untuk mengetahui proses kolaborasi antar actor. Hasil penunjukkan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya penurunan angka <i>stunting</i> pada puskesmas Ciampel. Penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash dalam mendeskripsi terkait proses kolaborasi.
2.	Gerobak Cinta: Model Pencegahan Stunting Di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur	(Herman Yosef Nende Lingge Kumanireng, R. Widodo Triputro, 2021) <a href="https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/146/96">https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/146/96</a>	Pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Flores Timur dilakukan dengan menerapkan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Dimana dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan inovasi dalam menangani <i>stunting</i> yang bernama “Gerobak Cinta”. Inovasi tersebut merupakan pemberian makanan tambahan kepada anak <i>stunting</i> dan ibu hamil selama 90 hari dengan memanfaatkan

			tanaman lokal masyarakat setempat.
3.	Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang	(Salsabila & Santoso, 2024) <a href="#">Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang   Salsabila   Journal of Public Policy and Management Review (undip.ac.id)</a>	Perkembangan masyarakat di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai sektor kehidupan global, salah satunya yaitu dampak kualitas sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh stunting berupa ketidakefektifan produktivitas seseorang karena rendahnya kemampuan kognitif akibat malnutrisi pada masa awal pertumbuhan. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan empat fenomena, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif untuk menggambarkan peran masing-masing aktor.
4.	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Wonogiri	(Widyowati, 2023) <a href="#">Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Wonogiri   Widyowati   Jurnal Mahasiswa Wacana Publik (uns.ac.id)</a>	Stunting pada anak merupakan kondisi gagal tumbuh akibat malnutrisi kronis yang dampak buruknya dapat berlangsung hingga jangka panjang karena proses kognitif yang tidak optimal, akan mengalami kesulitan belajar dan tidak produktif saat dewasa. Percepatan penurunan stunting menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan mengedepankan kolaborasi. Dalam kolaborasi melibatkan perangkat daerah, termasuk PKK dalam tim percepatan penurunan stunting, serta masyarakat.
5.	Implementasi Kebijakan Cegah Stunting Di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang	(Hafzana Bedasari, Frinda Novita, Azmi, Roli Sambuardi, 2021) <a href="#">View of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CEGAH STUNTING DI DESA</a>	Indonesia memiliki sebuah cita-cita dan harapan untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Untuk menciptakan momen seperti itu, diperlukan sebuah integritas bersama antara pemerintah dengan

	Kabupaten Karimun	<a href="http://universitaskarimun.ac.id">SEPEDAS KELURAHAN PASIR PANJANG KABUPATEN KARIMUN (universitaskarimun.ac.id)</a>	stakeholder terkait. Pemerintah Kabupaten Karimun masih perlu menambah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta melibatkan stakeholder khususnya kepada Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Karimun untuk menurunkan angka stunting.
6.	Es Krim Kelor: Produk Inovasi Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	(Rohmawati et al., 2019) <a href="http://unikastpaulus.ac.id">ES KRIM KELOR: PRODUK INOVASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DALAM 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)   Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat (unikastpaulus.ac.id)</a>	Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Jember merupakan salah satu kabupaten tertinggi masalah stunting. Stunting disebabkan oleh actormultidimensi, salah satunya adalah kurangnya asupan makanan bergizi yang berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam rangka menurunkan stunting, maka dibuatlah sebuah inovasi dalam rangka pencegahan stunting.
7.	Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman	(Sukanti & Faidati, 2021) <a href="http://unjani.ac.id">View of COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SLEMAN (unjani.ac.id)</a>	Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu campur tangan dari pihak lain. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model collaborative governance, peran setiap stakeholder, dan desain kelembagaan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman.

8.	Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung	(Sunaryo et al., 2022)  <a href="#">IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG (researchgate.net)</a>	Percepatan penurunan <i>stunting</i> memerlukan beberapa langkah dan cara yang efektif agar penurunan pada stunting dapat terlaksana dengan baik sesuai seperti yang ada pada arahan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 mengenai percepatan penurunan dan penanganan stunting. Percepatan, pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun berbagai kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun gizi spesifik dikarenakan dampak dari adanya pandemi Covid-19
9.	Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang	(Evalia Nuranita Putri, 2022)  <a href="#">COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA KALIRANDU, KECAMATAN PETARUKAN, KABUPATEN PEMALANG   Putri   Journal of Public Policy and Management Review (undip.ac.id)</a>	Permasalahan stunting merupakan masalah jangka panjang yang berdampak pada masa depan bangsa dan menjadi beban negara, Desa Kalirandu merupakan salah satu desa yang memiliki angka stunting yang tinggi dan termasuk dalam desa lokus stunting. Kolaborasi yang dibangun dalam penanggulangan stunting di Desa Kalirandu serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kolaborasi..
10.	Inovasi Sosial pada Penanganan Stunting: Penerapan Konsep Bapak Asuh Anak Stunting di Tambak Dahan,	(Wijayanti et al., 2023)  <a href="#">Inovasi Sosial pada Penanganan Stunting: Penerapan Konsep Bapak Asuh Anak Stunting di Tambak Dahan, Subang, Provinsi Jawa Barat   Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan</a>	Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) merupakan salah satu strategi pemerintah daerah untuk menggugah partisipasi birokrasi khususnya untuk mengupayakan penanganan percepatan penurunan stunting di masyarakat. Penanganan stunting membutuhkan kerjasama sinergis berbagai pihak, maka tata kelola

	Subang, Provinsi Jawa Barat	<a href="http://kemensos.go.id">Kesejahteraan Sosial (kemensos.go.id)</a>	kolaboratif menjadi opsi yang layak. Tata kelola kolaboratif yang inovatif dengan mengangkat kasus implementasi BAAS melalui dapur sehat. Kolaborasi merupakan rekomendasi strategis pada implementasi program BAAS Kabupaten Subang yang tepat untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif dengan mengakomodasi penerapan inovasi sosial sehingga tujuan publik yang strategis yaitu percepatan penurunan stunting yang memerlukan keterlibatan dan kerjasama berbagai pihak dapat tercapai.
--	-----------------------------	---	---

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, belum terdapat penelitian yang memakai studi kasus mengenai inovasi *collaborative governance* yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta/pemilik usaha, dan masyarakat dalam penanganan *stunting* tepatnya di Kabupaten Bantul. Terdapat pembaharuan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan studi pustaka sebelumnya yaitu, peneliti menggunakan proses kolaborasi teori menurut Ansell dan Gash yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan hasilakhir yang ingin dicapai. Dimana hal tersebut akan dibahas dalam hasil dan pembahasan untuk mengetahui peran dan keterlibatan para aktor dalam proses kolaborasi yang terjadi selama kegiatan inovasi program penanganan *stunting* tersebut berjalan.

## 1.6 Kerangka Dasar Teori

### 1.6.1 Stunting

Menurut Betty Yosephin Simanjuntak *stunting* merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi yang berulang. Gangguan ini ditandai dengan tinggi badan yang berada di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh menteri kesehatan (Rizki, n.d.). Menurut WHO *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh anak yang

terjadi pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Kondisi ini terjadi ketika anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari rata-rata untuk usianya. Selain itu, kondisi stunting yang di alami oleh anak-anak balita tersebut terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam penyebab dan indikator terjadinya stunting pada anak.

Persebaran kasus *stunting* pada balita banyak terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus stunting. Menurut WHO penyebab terjadinya kasus stunting dapat terjadi karena hambatan dalam pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang memadai dan terjadi penularan penyakit infeksi yang berulang. Selain itu salah satu penyebab masalah *stunting* pada balita juga disebabkan oleh gangguan pertumbuhan tulang. (Hendrayati & Asbar, 2018). Menurut (Agustina, 2022) menjelaskan bahwa penyebab lain dari terjadinya stunting dapat disebabkan oleh rendahnya pemberian makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan serta sumber protein hewani.

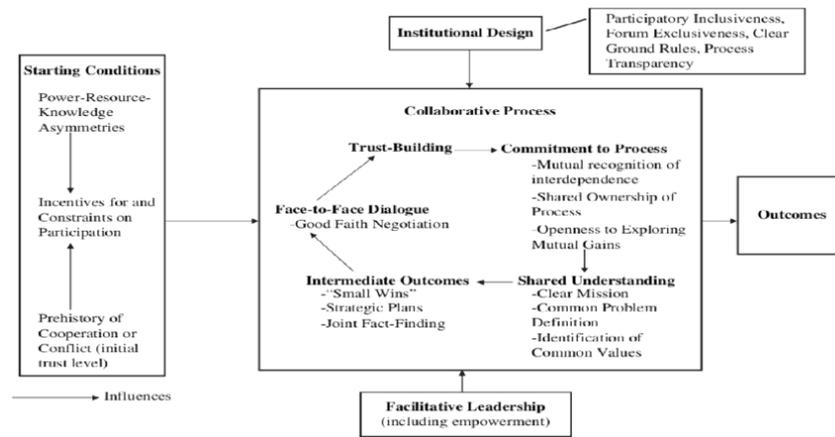
Selain itu, berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 menjelaskan terkait pelaksanaan teknis surveilans gizi sebagai indikator dari masalah gizi dan kinerja program gizi, yaitu balita berat badan kurang, balita pendek, balita gizi kurang, remaja putri anemia, ibu hamil anemia, ibu hamil risiko kurang energi kronik, dan bayi dengan berat badan lahir yang rendah (Kemenkes RI, 2019). Selain itu, berdasarkan hasil surveilan gizi melalui data pada aplikasi e-PPGBM, menyebutkan bahwa faktor penyebab stunting pada balita di Indonesia dapat disebabkan karena tidak adanya JKN, minimnya sumber air bersih, terjadinya cacangan, minimnya ketersediaan jamban sehat, IDL, tingginya indikasi merokok, riwayat KEK, penyakit penyerta, pola asuh yang kurang baik dan sosial ekonomi keluarga yang tidak stabil. Faktor determinn yang paling tinggi adalah adanya anggota rumah tangga 1.000 HPK merokok sebanyak 541 rumah tangga, di ikut dengan tingginya anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap (374 balita) (Afrita Sefen & Nurdin, 2023). Menurut Wamani

et al, dalam Sandra Fikawati dkk (2017) menjelaskan bahwa *stunting* merupakan dampak dari faktor seperti permasalahan berat badan bayi pada saat lahir yang rendah, stimulasi dan pengasuhan anak yang kurang tepat, asupan nutrisi kurang dan infeksi berulang serta berbagai faktor lingkungan lainnya.

### **1.6.2 Collaborative Governance**

Menurut Ansell dan Gash (2007) *collaborative governance* merupakan sebuah cara untuk dapat menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk ikut serta terlibat dalam pengambilan. Keputusan tersebut bisa memiliki imbas pada suatu permasalahan yang membutuhkan penanganan bersama, seperti halnya pada permasalahan *stunting*. Proses kolaborasi yang disampaikan oleh Ansell and Gash (2007) berfokus pada dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil (Ipan, Hanny Purnamasari, Evi Priyanti, 2021). Dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak, maka nantinya akan mempermudah dalam menjalankan mekanisme kolaborasi bersama, tepatnya pada permasalahan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bantul. Menurut Edward DeSeve 30 (Sudarmo, 2015) *collaborative governance* adalah sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dengan jelas. Dalam mencapai suatu tujuan, proses dinamika dalam *collaborative governance* akan sangat menentukan dalam titik capaian tujuan tersebut. Dimana peran dari berbagai aktor yang terlibat akan sangat membantu untuk bisa merealisasikan suatu tujuan bersama, dimana hal ini akan sangat berguna dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Bantul. Adapun model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) sebagai berikut:

Gambar 3 Model Collaborative Governance



Sumber: Ansell dan Gash (2007)

Dalam model collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007), terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam menjalankan proses collaborative governance. Terdapat 5 indikator dari proses *collaborative governance* yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain dalam model collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007), sebagai berikut:

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahap dialog tatap muka para stakeholders yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman Bersama, dan komitmen terhadap prosrs dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan. Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejala dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang

pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing stakeholders yang terlibat. Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup lama karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.

### 3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)

Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

### 4. *Shared Understanding* (saling memahami)

Stakeholders dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga didefinisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi.

### 5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu kolaborasi, perancangan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat menjalankan tupoksi pada masing-masing stakeholders guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

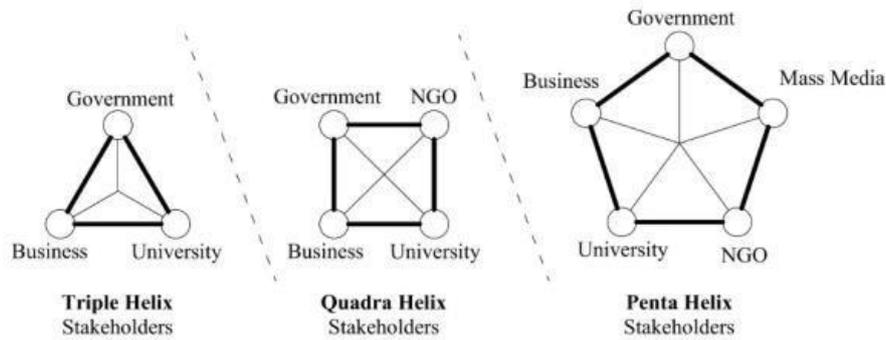
Dinamika *collaborative governance* merupakan sebuah forum yang digunakan untuk bisa mencapai suatu tujuan (Ipan, Hanny Purnamasari, Evi Priyanti, 2021). *Collaborative governance* merupakan suatu cara untuk dapat mencapai tujuan publik dengan melakukan kolaborasi antar organisasi maupun secara individu guna mencapai tujuan. Pemerintah akan sangat terbantu jika proses kolaborasi ini dapat melibatkan berbagai aktor, terlebih dalam

urusan penanganan permasalahan *stunting*. Menurut Holzer (2012) *collaborative governance* merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah bersama berbagai pihak untuk bisa mencapai tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat. Pemaparan tersebut sesuai seperti yang terjadi pada kondisi permasalahan *stunting*, dimana dalam praktek dilapangannya pemerintah membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa pihak untuk bisa menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Bantul.

Menurut Agranof & McGuire (Joo Chang, 2009) *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multisektor yang melebihi tuntutan kapasitas. Kolaborasi dapat berjalan secara terstruktur dengan melibatkan beberapa aktor yang terlibat. Masing-masing memiliki peran dan kewenangannya dalam menjalankan proses kolaborasi yang berjalan dalam penanganan *stunting* pada Kabupaten Bantul. Proses kolaborasi ini pastinya bersifat siklus atau cenderung berulang. Menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) proses kolaborasi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan siklus yang cenderung berulang yang menjelaskan dinamika dalam kolaborasi seperti keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama (Muhammad Muqorrobin, 2016). Dimana masing-masing pada proses kolaborasi tersebut saling terhubung untuk menciptakan sebuah kolaborasi yang nyata dari berbagai aktor yang terlibat.

Terdapat beberapa model pemangku kepentingan atau *stakeholder* dalam *collaborative governance*. Model tersebut yaitu triple helix, quadruple helix, dan penta helix.

Gambar 4 Model Pemangku Kepentingan



Sumber: (Abd. RACHIM, 2020)

### 1. Triple Helix

Triple Helix adalah konsep sistem konstruksi analitis yang merangkum fitur-fitur utama. Interaksi triple helix dengan pendekatan sistem inovasi. Sistem Triple Helix didukung oleh tiga aspek utama: komponen-komponen di dalam sistem, hubungan antar komponen, dan fungsionalitas sistem. Komponen dasar terdiri dari lingkungan kelembagaan universitas, industri, dan pemerintah. Menurut Tatang Suheri, Selfa Septiani Aulia (2017). Konsep triple helix ini sejalan dengan teori Etzkowitz (2008) Perkembangan inovasi di suatu bidang muncul dari kerjasama antar pemerintah, intelektual, dan pelaku ekonomi. Penta helix memperluas strategi triple helix dengan menggabungkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi untuk memungkinkan inovasi.

Melalui kerjasama yang sinergis ini diharapkan berbagai sumber daya dapat bekerja secara inovatif. Triple helix pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Etzkowitz dan Leydesdorff Ketika mereka memperkenalkan model triple helix dengan unsur sains, bisnis dan pemerintahan. Penciptaan pengetahuan didorong oleh sektor universitas. Selanjutnya, kita berinteraksi dengan bidang ketiga: pemerintah. Ketiga pihak bekerja sama dari atas hingga bawah dalam melakukan inovasi yang dapat memperbaiki keadaan perekonomian negara. Triple Helix kemudian didesain ulang menjadi quadruple helix dengan ditambahkan unsur sipil

atau komunitas untuk mencerminkan sudut pandang masyarakat. Konsep quadruple helix dikembangkan dengan tetap mempertahankan interaksi model triple helix. (jaringan iptek antara universitas, industri, dan pemerintah) dan melibatkan seluruh masyarakat sipil dalam sistem tersebut.

## 2. Quadruple Helix

Konsep quadruple helix belum mapan dan banyak digunakan dalam penelitian inovasi dan kebijakan inovasi. Namun, ketika kita menganalisis literatur inovasi, kita sampai pada kesimpulan bahwa terdapat berbagai konsep yang disebut jenis konsep inovasi. Beberapa di antaranya sangat dekat dengan konsep triple helix, yang lain menyimpang secara radikal, dan banyak di antaranya berada di antara dua ekstrem ini. Secara umum terjadi pada semua jenis konsep inovasi adalah dimasukkannya kelompok keempat pelaku inovasi dalam model triple helix. Beberapa orang mengklaim bahwa ada organisasi pilar ke 4 yang membuat hubungan antara organisasi triple helix yang harus dimasukkan dalam model inovasi triple helix (Liljemark 2004). Beberapa orang menyebut pilar ke 4 atau organisasi perantara ini sebagai organisasi yang memungkinkan inovasi (Liljemark 2004). Mereka bertindak sebagai broker dan penggiat jejaring di antara organisasi organisasi triple helix.

Pendekatan pilar keempat ini sedikit melampaui model triple helix dan sangat mirip dengan konsep sistem inovasi yang disajikan sebelumnya. Model quadruple helix dapat dilihat sebagai pengembangan lebih lanjut dari perspektif triple helix. Fokusnya adalah pada peningkatan peran masyarakat sipil serta pelaku ilmu pengetahuan, politik, dan bisnis (Leydesdorff 2012). Jenis aktivitas inovasi quadruple helix memungkinkan terjadinya inovasi yang lebih luas dibandingkan model triple helix. Fokus kegiatan inovasi triple helix adalah menciptakan inovasi teknologi tinggi berdasarkan teknologi dan pengetahuan penelitian terkini. Oleh karena itu, model Triple Helix dianggap lebih cocok untuk perusahaan teknologi tinggi berbasis sains

dibandingkan jenis bisnis lainnya. Sebaliknya, kegiatan inovasi jenis quadruple helix dapat berfokus pada penciptaan jenis inovasi lain dan penerapan teknologi yang ada, pengetahuan penelitian, dan pengetahuan pengguna. Bagi usaha kecil dan menengah, aktivitas inovasi yang meningkat empat kali lipat dan sifatnya yang berorientasi pada pengguna dapat membuka peluang baru untuk berpartisipasi dalam kegiatan inovasi, dan tidak hanya bagi perusahaan berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis bukti. Hal ini membuka peluang baru untuk jenis lainnya UKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan inovasi. Perusahaan berbasis sains sebagai pelanggan.

### 3. Penta Helix

Konsep penta helix merupakan sebuah pengembangan dari triple helix dengan pemangku kepentingan seperti akademisi, bisnis/swasta, dan pemerintah yang kemudian dikembangkan menjadi pentahelix dengan menambah beberapa pemangku seperti pemerintah, akademisi, komunitas, masyarakat dan media untuk menciptakan sebuah kolaborasi dengan harapan keuntungan bersama. (Etzkowitz, 1995) model triple helix disini pertama kali di kenalkan Oleh Etzkowitz dan Leydesdorff dengan mempunyai beberapa unsur yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dan swasta/bisnis.

Menurut (Riyanto:2018) penta helix disini merupakan sebuah model yang melibatkan beberapa kepentingan baik itu dari lembaga pemerintah atau non profit untuk menciptakan sebuah inovasi melalui kerja sama dengan dukungan dari beberapa sumber daya yang bermacam-macam. Model penta helix memang mempunyai fungsi yang sangat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan dimana terdapat pemangku kepentingan yang mewakili berbagai kepentingan pada satu lokasi. Sebuah kolaborasi dengan menggabungkan 5 pemangku dapat mewujudkan sebuah kebijakan dengan dukungan dan interaksi dari beberapa sumber daya secara optimal.

Adapun penjelasan dari 5 kelompok kepentingan yang terdiri dari pemerintah, swasta/bisnis, akademisi, masyarakat, dan media massa. Berikut beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam konsep penta helix dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pemerintah

Unsur dari pemerintah ini berisi organisasi budaya yang di danai publik, parlemen, kepolisian, militer, rumah sakit dan layanan publik lainnya. Pada tingkat nasional ada pemerintah nasional dan badan-badan nasional yang relevan.

#### 2. Akademisi

Unsur dari akademisi ini dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk pengembangan pada suatu kebijakan, baik itu dari keahlian pengetahuan dari kesehatan, ilmuwan, dokter, geografi, pendidik, arsitek, serta administrasi publik. Selain itu berisi praktisi dari nasional maupun internasional yang dapat berkontribusi melalui pengetahuan dan pengalaman, seperti organisasi penelitian, advokasi atau konsultan biasanya sering mengungkapkan sebuah pendapat yang lebih kuat dan relevan terhadap suatu masalah.

#### 3. Bisnis/Swasta

Unsur dari dunia usaha atau bisnis adalah perwakilan dari beberapa unsur seperti koperasi, pengacara, akuntan atau profesi lainnya baik nasional maupun internasional. Unsur bisnis disini lebih berperan pada memberi baik itu dalam bentuk jasa, nominal dan bentuk lainnya. Dengan tujuan untuk membawa perkembangan yang baik kepada profesinya.

#### 4. Masyarakat (*civil society*)

Unsur dari *civil society* ini berupa non pemerintah baik itu secara sukarela memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat umum dengan tidak memperoleh keuntungan dari

organisasi tersebut. *Civil society* disini biasanya lebih menjaga perilaku dengan memiliki adab, kesopanan, budaya, keramahan dalam lingkungannya dengan menjaga hubungan yang harmoni dengan masyarakat dan mampu menghargai dari setiap masing-masing individu. *Civil society* disini lebih berdasar kepada pengabdian kepada masyarakat dengan mempunyai hak masing-masing tetapi dengan kapasitas yang sama.

## 5. Media Massa

Media massa disini berisi semua media baik dari bentuk digital maupun bukan. Dengan harapan akan diketahui oleh masyarakat luas melalui media yang dimilikinya tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa proses *collaborative governance* dapat berjalan dengan baik jika adanya aspek-aspek yang ikut bekerja sama seperti pemerintah serta beberapa pemangku kepentingan seperti pihak swasta/bisnis, akademisi, masyarakat madani (*civil society*), dan media massa dalam berkolaborasi mengenai penanganan stunting di Kabupaten Bantul. Kolaborasi yang terjalin nantinya akan berhubungan dengan kelompok kepentingan lainnya. Kelompok kepentingan disini meliputi triple helix (pemerintah, swasta, dan akademisi), quadruple helix (pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat madani), dan penta helix (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat madani, dan media massa). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan hasil akhir yang dicapai. Selain itu, untuk mendeskripsikan keterlibatan para pemangku kepentingan disini menggunakan bentuk penta helix. Dimana penta helix dipilih karena mampu menjelaskan mengenai bagaimana proses *collaborative governance* yang terjalin antar pemangku kepentingan dalam penanganan stunting yang terdiri dari pemerintah, swasta/bisnis, akademisi, masyarakat madani, dan media massa.

## 1.7 Definisi Konseptual

### 1.7.1 Stunting

*Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan gizi. *Stunting* dapat terjadi sejak usia janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. (*STUNTING*, n.d.).

### 1.7.2 Collaborative Governance

*Collaborative Governance* merupakan salah satu dari tipe *governance*. Dimana dalam konsep ini dibangun antara pemerintah dengan pemangku kepentingan seperti swasta/bisnis, masyarakat dll dengan cara saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. (Regmtya, 2021).

## 1.8 Definisi Operasional

Tabel 2 Variabel, Indikator, dan Parameter Dalam Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	<i>Stunting</i>	Determinan <i>Stunting</i>	Tujuh indikator <i>stunting</i> dalam e-PPGBM:  1. Kepemilikan JKN/BPJS  2. Keterbatasan air bersih  3. Jamban sehat  4. Merokok  5. Status imunisasi  6. Ibu Hamil KEK  7. Penyakit penyerta
2.	<i>Collaborative Governance</i>	Proses Kolaborasi Antar <i>Stakeholders</i>	Proses <i>collaborative governance</i> dalam penanganan <i>stunting</i> dengan menggunakan teori Ansell dan Gash:  1. Dialog tatap muka (Dialogue face to face)

			<p>2. Membangun kepercayaan (Trust Building)</p> <p>3. Komitmen terhadap proses (Commitment to the process)</p> <p>4. Saling memahami (Shared understanding)</p> <p>5. Hasil akhir yang dicapai (Intermediate outcomes)</p>
--	--	--	---

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019, hlm. 18), metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berasal dari sebuah filsafat postpositivisme yang digunakan untuk menyelidiki sebuah subjek dalam kondisi alamiah (keadaan riil, tidak disetting, atau keadaan eksperimen). Dimana peneliti berperan sebagai instrumen utamanya (Thabroni, 2022). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk membuat sebuah gambaran yang akurat mengenai berbagai fakta-fakta dilapangan mengenai seperti apa bentuk dari inovasi yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya pemerintah dalam memberikan sebuah inovasi kebijakan untuk menangani dan menanggulangi permasalahan *stunting* yang ada di Kabupaten Bantul.

### 1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian.

### 1.9.3 Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti akan melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer maupun data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber asli dan data ini ditemukan melalui interaksi dengan narasumber responden yang merupakan individu sebagai subjek penelitian atau yang memberikan informasi. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi dan data-data mengenai inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani kasus *stunting*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pengamatan secara langsung, namun didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan semua informasi yang mendukung mengenai inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani kasus *stunting*.

#### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011: 103) teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk kepentingan penelitian (Azis, 2022). Kegiatan penelitian ini adalah mendapatkan sebuah data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data primer yaitu memperoleh izin dari fakultas untuk melakukan penelitian. Setelah memperoleh izin penelitian, peneliti akan memberikan surat penelitian ke pihak-pihak yang dibutuhkan datanya untuk melengkapi data penelitian. Selain itu, dalam melakukan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan meninjau beberapa referensi jurnal dan penelitian terdahulu untuk

melengkapi cakupan data dari kegiatan penelitian tersebut. Berikut beberapa metode yang ingin digunakan:

### **1. Teknik Wawancara**

Menurut Kvale & Brinkmann wawancara merupakan sebuah cara yang dilakukan dalam komunikasi antara peneliti dengan responden yang melibatkan serangkaian pertanyaan yang diarahkan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai pengalaman dan pandangan responden tentang suatu topik atau masalah dalam penelitian (Prafitasari, 2023). Dalam kegiatan tersebut, wawancara menjadi sebuah langkah yang dilakukan untuk melengkapi kegiatan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk menggali data mengenai proses collaborative governance pada program inovasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Bantul. Adapun wawancara dilakukan untuk dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang tersebar di beberapa titik instansi pemerintah. Untuk itu terdapat beberapa narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini adalah:

- Ibu Zubaindra Indah M, S.Gz selaku Staff Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
- Ibu Khikayah Aisiah, S.ST selaku Ahli Gizi di Puskesmas Imogiri II
- Ibu Dini Kurniadita, selaku Ahli Gizi di Puskesmas Imogiri II

### **2. Teknik Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sastrawacana, 2023). Kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan pengurusan perizinan akses data yang akan dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian dinas kesehatan Kabupaten Bantul.

Pengurusan permintaan akses data tersebut dilakukan untuk dapat mampu masuk ke dalam web situs e-PPGBM untuk meninjau data terkait yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian, salah satunya untuk meninjau beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting di wilayah kawasan daerah Kabupaten Bantul pada periode tahun 2023.

#### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiono teknik analisis data adalah suatu penelitian yang sulit untuk dilakukan dan dibutuhkan kerja keras, cara berpikir yang kreatif, dan wawasan tinggi merupakan suatu proses atau cara yang digunakan dengan tujuan memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan (Salmaa, 2023). Teknik analisis data merupakan suatu tahapan dalam melakukan sebuah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah dalam mendapatkan sebuah hasil dari suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mempunyai 4 tahapan, yaitu reduksi data, analisis data, penyajian data dan kesimpulan.

#### **1. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2015), reduksi data adalah mencatat data yang telah diperoleh dengan teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data juga dilakukan untuk memandu peneliti agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Ariyani, 2022). Reduksi data dengan analisa data yang dilakukan dengan proses pemilihan data dan informasi yang akan didapatkan selama penelitian dilapangan. Penelitian ini dilakukan diringkas dan fokus pada konsep dan pola data yang dirancang dalam bentuk analisa akhir. Hasil observasi dilapangan yang kemudian direduksi dengan langkah peneliti dalam menyederhanakan data, yaitu semua hasil pengamatan yang diperoleh berdasarkan pada hasil olah data dari situs apliaksi e-PPGBM. Peneliti mencatat atau merekam kemudian peneliti melaporkan secara jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah yang

dilakukan peneliti dari hasil wawancara dalam mereduksi data. Menggolongkan informasi-informasi, serta tanggapan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terkait perizinan akses masuk pada situs aplikasi e-PPGBM.

## **2. Analisis Data**

Menurut Patton (1980) analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk dapat menyelesaikan permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian (Setiawan, 2023). Kegiatan analisis data dilakukan untuk dapat memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan terkait dengan data penelitian yang sudah di dapatkan dari lapangan. Dalam penelitian ini, nantinya hasil dari apa yang sudah didapatkan pada aplikasi e-PPGBM nantinya dapat dideskripsikan dan disederhanakan untuk mempermudah dalam melakukan pengelolaan data dan mempermudah peneliti dalam menyederhanakan hasil penelitian yang didapat dilapangan.

## **3. Penyajian Data**

Menurut Bambang Widjanarko penyajian data merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Rabbani, n.d.). Penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil akhir penelitian dengan kalimat yang disusun secara logis dan mudah. Sehingga penyajian data yang jelas bisa membantu peneliti untuk menyelesaikan hasil akhir. Penyajian data menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti diagram lingkaran yang menunjukkan hasil olah data dari aplikasi e-PPGBM. Penyajian data merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang disusun dari berdasarkan kategori dan pengelompokan yang diperlukan.

#### **4. Kesimpulan**

Data yang telah disajikan menggunakan jenis teknik analisis data. Hal ini merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mencari sebuah kesimpulan yang disusun berdasarkan dari proses yang dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung. Pada hasil dari data dan informasi ditemukan suatu keseluruhan data informasi yang didapat bisa diuji kebenarannya dan kecocokan sesuai dengan tujuan dari kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, semua data lapangan diolah untuk memunculkan data terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *stunting* di kawasan wilayah Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan hasil data yang diperoleh dari situs aplikasi e-PPGBM.